

# **DAYA SAING USAHA TERNAK SAPI PERAH RAKYAT DI KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR**

**Harmini Adibowo**

Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen,  
Institut Pertanian Bogor  
Email : harminiadibowo@yahoo.com,

**Feryanto**

Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen,  
Institut Pertanian Bogor  
Email : ferywillcharo@yahoo.com

## ***Abstract***

*Up to present, the dairy farmers only able to meet 25-30 percent of all milk demand in Indonesia, although milk and its derivatives continues to increase steadily. This condition occurs due to low milk productivity, small-scale dairy farm unit, inadequate government policies as well as economic globalization. The objectives of this study are, first, to measure the competitiveness of the small-scale dairy farm. Second, to evaluate the impact of government policies. Third, lastly, to analyse the implication of price changes on input-output. A Policy Analysis Matrix (PAM) for data is applied. The results show that, first, the small-scale dairy farms operate in competitiveness. Second, so far government policies did not provide adequate incentives and directly promote the dairy farms's competitiveness. Third, high import tariff (15 percent) could significantly protect the competitiveness of the small-scale dairy farms.*

*Keywords: competitiveness, small-scale dairy farm, Policy Analysis Matrix.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Berdasarkan *Human Development Indeks* (HDI) posisi Indonesia saat ini masih tergolong rendah, berada pada peringkat ke 112 dari 147 negara (Babiker *et.al*, 2011). Penentu kualitas sumberdaya manusia salah satunya adalah kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Susu merupakan sumber pangan yang berkualitas sangat baik sebagai sumber protein. Susu adalah produk primer dari peternakan sapi perah.

Pada tahun 2011 rata-rata konsumsi susu masyarakat Indonesia sekitar 11,09 liter per kapita per tahun. Jumlah konsumsi susu masyarakat Indonesia ini masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 22,1 liter per kapita per tahun, Thailand 33,7 liter per kapita per tahun, dan India mencapai 42,08 liter per kapita per tahun. Dalam kurun waktu tahun 2008-2011 terjadi rata-rata peningkatan konsumsi susu masyarakat sebesar 8,91 persen per tahun. Konsumsi susu masyarakat Indonesia akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2012).

Produksi susu yang berasal dari peternakan sapi perah dalam negeri masih belum dapat memenuhi kebutuhan domestik, sehingga Indonesia masih harus impor dalam jumlah yang besar dan cenderung terus meningkat. Walaupun jumlah sapi perah dan produksi susu dari tahun 2006 hingga 2010 terus mengalami peningkatan, namun produksi ini masih jauh di bawah kebutuhan susu masyarakat (Tabel 1). Penyebab rendahnya produksi susu nasional diantaranya adalah terbatasnya jumlah sapi perah yang dimiliki oleh setiap unit usaha serta rendahnya produktivitas susu per ekor sapi. Kesenjangan antara produksi dan konsumsi yang terjadi dipenuhi oleh pemerintah dengan jalan melakukan impor. Impor susu pada tahun 2008 mencapai 1.812,2 ribu ton atau meningkat 3.8 ribu ton dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 1.808,4 ribu ton. Proporsi susu impor terhadap total kebutuhan konsumsi susu nasional pada tahun 2008 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 76.6 persen. Pada tahun 2012 terjadi penurunan proporsi susu impor terhadap kebutuhan susu nasional menjadi sekitar 70 persen (diolah dari data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2012).

*Supply* dan *stock* komoditas pertanian, termasuk susu, yang diperdagangkan di pasar global cenderung menurun, sebagai dampak dari perubahan iklim global dan peningkatan permintaan pasar. Perubahan tersebut akan mendorong kenaikan harga

**Tabel 1.**  
**Populasi Sapi Perah dan Produksi Susu Segar di Indonesia, Tahun 2006-2010.**

Tahun	Populasi Sapi Perah (000 ekor)	Produksi Susu segar (000 kg)
2006	369	616.549
2007	374	567.682
2008	458	646.953
2009	475	827.249
2010	495	927.838

Sumber : Ditjenak, 2010.

susu di pasar internasional dengan dinamika yang sulit diprediksi. Tampak disini bahwa agribisnis sapi perah berperan penting dan strategis dalam upaya penyediaan dan pencukupan gizi masyarakat. Besarnya potensi sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia memungkinkan agribisnis sapi perah dikembangkan lebih lanjut sehingga produksi susu nasional dapat meningkat, devisa untuk import susu dikurangi, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pembangunan, pengembangan wilayah dan menjadi sumber pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Pada umumnya peternakan sapi perah rakyat merupakan usaha keluarga di pedesaan dengan jumlah penguasaan sapi yang terbatas. Rata-rata jumlah sapi perah yang dimiliki peternak antar wilayah bervariasi, yang tertinggi di Jawa Timur (8 ekor) dan yang terendah di Jawa Barat sebanyak 4,2 ekor<sup>1</sup>. Usaha ternak sapi perah Indonesia yang masih berskala sangat kecil

ini harus berhadapan dengan pasar global dan bersaing dengan produk impor. Di tengah-tengah situasi perdagangan bebas dan persaingan dengan susu impor, peran pemerintah dalam perdagangan susu sapi perah menjadi amat penting.

#### **Perumusan Masalah**

Untuk melindungi dan mengembangkan usahaternak sapi perah rakyat di Indonesia, pemerintah berupaya melindungi dengan menetapkan bea masuk untuk setiap kilogram susu yang diimpor. Feryanto (2010) menyebutkan bahwa sejak 2008, pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan peraturan No. 145/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk sebesar lima (5) persen. Namun pada tahun 2009, karena Indonesia kekurangan pasokan dan mulai diterapkannya aturan kerjasama perdagangan yang disepakati di WTO, untuk produk-produk seperti susu tidak dikenakan tarif (bea masuk nol persen). Sebagai akibat

harga susu impor menjadi lebih murah dibanding sebelumnya. Kondisi ini sempat menjadikan harga susu yang diterima peternak sangat rendah, rata-rata hanya sekitar Rp. 2.700-3.000 per liter. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya pemerintah pada tahun yang sama (Juli 2009), memberlakukan kembali tarif bea masuk susu sebesar lima (5) persen. Nilai tarif bea masuk ini masih jauh dari rekomendasi Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) yang menginginkan tariff bea masuk sebesar 15 persen. Dengan adanya aturan perdagangan bebas membuat pemerintah relatif tidak dapat 'bergerak' bebas untuk melindungi produk dalam negerinya.

Permasalahan lain yang dihadapi peternak adalah rendahnya harga jual susu yang dihasilkannya. Walaupun produk susu segar yang dihasilkan peternak sangat dibutuhkan oleh Industri Pengolah Susu (IPS), namun pada prakteknya peternak sapi perah hanyalah *pricetaker*. Kenaikan harga susu impor, seharusnya menjadi momentum untuk dapat meningkatkan harga jual susu di tingkat peternak. Namun dampak kenaikan harga tersebut tidak cukup memberikan insentif bagi peternak untuk mengembangkan usahaternak yang dijalankannya.

Kabupaten Malang, sebagai salah satu daerah sentra penghasil susu di Jawa Timur dan Indonesia memiliki permasalahan yang sama seperti yang disampaikan diatas. Peternak hanya bertindak sebagai *price*

*taker* dari kondisi pasar yang *oligopsoni* dan bahkan sekarang cenderung ke arah *monopsoni*. Kondisi peternak semakin sulit, dikarenakan IPS lebih cenderung menggunakan susu impor bila dibandingkan dengan susu segar. Walaupun pada dasarnya harga susu impor relatif lebih mahal, serta susu yang diimpor bentuknya *skim powder* (susu bubuk/tepung) yang ketika diolah harus menambah lemak nabati atau hewani lainnya, sehingga harga produk akhir menjadi relatif mahal. Pada dasarnya akan jauh lebih murah ketika Indonesia memproduksi susu dengan memanfaatkan dan mengolah sumberdaya yang lokal yang dimiliki.

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis keunggulan kompetitif dan komparatif komoditas susu sapi di Kabupaten Malang.
- 2) Menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing komoditas susu sapi di Kabupaten Malang.
- 3) Menganalisis sensitivitas perubahan harga output dan input terhadap daya saing peternakan sapi perah di Kabupaten Malang.

### Ruang Lingkup

Lingkup atau batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang merupakan sentra penghasil susu terbesar di Jawa Timur.
- 2) Penelitian ini dilaksanakan pada level usahaternak sapi perah rakyat, dengan kepemilikan sapi rata-rata 1-3 ekor per peternak.
- 3) Berdasarkan sumberdaya dan data yang terbatas bahwa analisis yang dilakukan ini merupakan terbatas pada penggunaan data *cross section* yang statis, sehingga dilakukan skenario dalam analisis sensitivitas.

## KERANGKA PEMIKIRAN

### Konsep Daya Saing

Esterhuizen *et.al* (2008) dalam Daryanto (2009) mendefinisikan “dayasaing sebagai kemampuan suatu sektor, industri, atau perusahaan untuk bersaing dengan sukses untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di dalam lingkungan global selama biaya imbangannya lebih rendah dari penerimaan sumberdaya yang digunakan”.

Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing suatu komoditi adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan dan efisiensi dalam pengusahaan komoditas tersebut. Keuntungan dapat dilihat dari dua sisi, yakni keuntungan privat dan keuntungan sosial. Sementara itu, efisiensi pengusahaan komoditas dapat dilihat dari dua indikator yaitu keunggulan komparatif

dan kompetitif. Berdasarkan hal tersebut konsep dayasaing yang digunakan adalah dayasaing menurut Esterhuizen *et.al* (2008) dalam Daryanto (2009), dimana memungkinkan ditingkat produsen suatu komoditi dapat memiliki keunggulan komparatif yakni memiliki biaya *opportunity cost* yang relatif lebih rendah, namun ditingkat konsumen komoditi tersebut tidak memiliki keunggulan kompetitif, karena adanya distorsi pasar. Sebaliknya karena ada intervensi dari pemerintah suatu komoditi dapat memiliki keunggulan kompetitif namun tidak memiliki keunggulan komparatif.

### Keunggulan Komparatif

Sudaryanto dan Simpatupang (1993) dalam Daryanto (2009) menyebutkan bahwa konsep keunggulan komparatif merupakan ukuran daya saing (keunggulan) potensial dalam artian daya saing yang akan dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distorsi. Dengan kata lain komoditas yang memilih keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki keunggulan efisiensi secara ekonomi.

Pearson *et al.* (2005) mengemukakan bahwa keunggulan komparatif bersifat dinamis, dengan kata lain keunggulan komparatif tidak stabil dan dapat diciptakan karena dipengaruhi oleh perubahan dalam sumberdaya alam, perubahan faktor-faktor biologi, perubahan harga input, perubahan teknologi, dan biaya transportasi. Suatu

daerah yang memiliki keunggulan komparatif di sektor tertentu secara potensial harus mampu mempertahankan dan bersaing dengan negara lain. Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dapat dikatakan telah mencapai efisiensi ekonomi yang terkait dengan kelayakan secara ekonomi.

### **Keunggulan Kompetitif**

Konsep keunggulan kompetitif (*Competitive Advantage*) menurut Porter dalam Daryanto (2009), dalam era persaingan global saat ini suatu negara yang memiliki *competitive advantage of nation* dapat bersaing di pasar internasional bila memiliki empat faktor penentu yakni, pertama, *factor conditions* yakni posisi negara dalam penguasaan faktor produksi, seperti tenaga kerja terampil atau infrastruktur. Kedua, *Demand Conditions*, berupa besarnya permintaan pasar domestik untuk produk-produk dan jasa-jasa industri. Ketiga, *Relating and supporting industries*, berupa kehadiran industri pemasok atau pendukung dan lain-lain dalam suatu negara sangat berkaitan dengan kemampuan daya saing industri-industri di pasar internasional. Keempat, *Firm strategy, structure and rivalry*, yakni kondisi pemerintahan di dalam suatu negara bagaimana perusahaan diciptakan, diorganisasi dan dikelola, sebaik persaingan domestik secara ilmiah.

Keunggulan kompetitif (*Competitive Advantage*) juga dapat didefinisikan sebagai alat bantu untuk mengukur daya saing suatu aktivitas berdasarkan perekonomian aktual atau harga pasar. Hal ini berbeda dengan konsep keunggulan komparatif yang mengukur manfaat aktivitas ekonomi dari segi masyarakat keseluruhan atau general. Keunggulan kompetitif dalam perkembangannya merupakan konsep yang sesuai untuk mengukur kelayakan secara finansial. Artinya jika suatu komoditas memiliki keunggulan secara kompetitif dan komparatif, maka komoditas tersebut layak dan menguntungkan untuk diproduksi dan dapat bersaing di pasar internasional.

### **Konsep Dampak Kebijakan Pemerintah pada Komoditas Pertanian**

Kebijakan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya saing komoditas pertanian pada umumnya, baik di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan pemerintah ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi produk dalam negeri atau pun meningkatkan ekspor agar dapat bersaing dengan produk luar negeri. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk input dan output sehingga terjadi perbedaan harga yang diterima produsen (harga privat) dengan harga yang sebenarnya terjadi (harga sosial). Kebijakan yang diterapkan pada suatu komoditas ada dua bentuk yaitu subsidi dan kebijakan perdagangan.

Kebijakan subsidi terdiri dari subsidi positif dan subsidi negatif (pajak), sedangkan kebijakan perdagangan berupa tarif dan kuota.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah pemasok susu sapi terbesar di Indonesia. Pemilihan Kabupaten Malang juga dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan kabupaten tersebut merupakan penghasil susu sapi terbesar di Jawa Timur, yaitu 174.176 ton pada tahun 2010.

Kegiatan survei lapang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus – 16 September 2012. Penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan peternak sapi perah dan dengan pengurus koperasi susu yang terpilih sebagai responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari BPS (Biro Pusat Statistik), Departemen Pertanian, Dewan Persusuan Nasional, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Dinas Peternakan serta instansi lain yang dapat membantu penyediaan data pada penelitian ini.

Data primer yang dibutuhkan meliputi: (1) data harga input-input *tradable* dan *non tradable* (*factor domestic*) yang berlaku di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, (2)

Karakteristik usahaternak sapi perah. Data sekunder yang dibutuhkan terdiri dari: (1) Kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam pengembangan usaha ternak sapi perah dan komoditas susu; (2) Data ekspor dan impor, nilai pendapatan pajak ekspor dan impor, nilai total dari kegiatan impor dan ekspor; (3) Perkembangan data harga susu (domestik dan impor), nilai tukar dan harga berdasarkan pelabuhan acuan (cif). Data ini secara keseluruhan akan digunakan untuk melengkapi pembahasan secara komprehensif terhadap hasil penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah usahaternak sapi perah dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang peternak sebagai responden. Pemilihan responden ditentukan berdasarkan informasi dari pengurus koperasi dan ketua kelompok peternak.

Pengukuran daya saing dan dampak kebijakan pemerintah, pada kegiatan usahaternak sapi perah rakyat, menggunakan pendekatan analisis yang dikembangkan oleh Monke dan Pearson melalui *Policy Analysis Matrix* (PAM)<sup>2</sup> (Mongke dan Pearson, 1998; Mongke *et.al*, 2005). Kerangka kerja PAM secara ringkas terangkum dalam tabel PAM (lihat Tabel 2). Daya saing yang diukur meliputi keunggulan komparatif dan kompetitif. Tahapan dalam pendekatan PAM meliputi: *pertama*, menentukan input dan output pada usahaternak sapi perah; *kedua*, mengalokasikan komponen input dan output

ke dalam komponen *tradable* dan non *tradable*; *ketiga*, menentukan harga bayangan input dan output; dan yang *terakhir*, melakukan pengolahan dengan menggunakan kerangka kerja PAM (lihat Tabel 2).

Perhitungan nilai output mengacu pada formulasi yang digunakan oleh Erwidodo dan Sayaka dalam Priyanti *et al.* (2004), untuk menghitung harga susu dunia setara dengan harga susu segar dalam negeri, dimana harga susu dunia dihitung atas dasar harga satu kilogram *Full Cream Milk Powder* (FCMP) setara dengan delapan kilogram susu segar. Harga rata-rata susu

FCMP per liter sesudah dikonversi adalah sebesar Rp. 4.870,63, perhitungan ini didasarkan pada data rata-rata susu internasional pada bulan September 2012 (*International Dairy Product Prices*, Oktober 2012). Harga tersebut sudah termasuk biaya pengapalan dan asuransi (Lampiran 1, 2, 3, dan 4).

Analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat kepekaan usaha ternak sapi perah akibat perubahan komponen harga input dan output, atau karena perubahan kebijakan pemerintah. Analisis sensitivitas dalam penelitian ini dibatasi terhadap kemungkinan perubahan kebijakan yang

**Tabel 2. Policy Analysis Matrix (PAM).**

Keterangan	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Input Tradable	Input Non Tradable (faktor domestik)	
Harga privat	A	B	C	D
Harga Sosial	E	F	G	H
Efek Divergensi	I	J	K	L

Keterangan :

- 1) Keuntungan Privat (PP) = D = A-B-C
- 2) Keuntungan Sosial (SP) = H = E-F-G
- 3) Transfer Output (OT) = I = A-E
- 4) Transfer Input untuk Input *Tradable* (IT) = J = B-F
- 5) Transfer Faktor untuk Non *Tradable* (FT) = K = C-G
- 6) Transfer Bersih (NT) = L = D-H atau I-J-K
- 7) Rasio Biaya Privat (PCR) = C/(A-B)
- 8) Rasio Biaya Sumberdaya Domestik (DRC) = G/(E-F)
- 9) Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) = A/F
- 10) Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI) = B/F
- 11) Koefisien Proteksi Efektif (EPC) = (A-B)/(E-F)
- 12) Koefisien Keuntungan (PC) = D/H
- 13) Rasio Subsidi Bagi Produsen (SRP) = L/E

Sumber : Pearson *et al.* (1998)

sangat berpeluang terjadi dan berpengaruh sangat besar terhadap hasil analisis. Ada beberapa skenario atau dasar perubahan kebijakan yang akan digunakan dalam analisis sensitivitas ini, yakni:

(1) Perubahan terhadap harga output

Bila terjadi penurunan atau kenaikan harga akibat dari perubahan tarif impor susu yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan faktor lain dianggap tetap. Tarif impor merupakan indikator yang dapat dikelola oleh pemerintah. Pada penelitian ini diskenariokan terjadi penetapan tarif 15 persen. Penentuan nilai 15% sebagaimana yang diusulkan oleh GKSI bahwa tarif yang relatif memihak kepada peternak terhadap masuknya susu impor adalah sebesar 15 persen.

(2) Perubahan terhadap harga input

Bila terjadi peningkatan harga pakan ternak (konsentrat) dengan asumsi semua faktor lain tetap. Skenarionya adalah apabila terjadi peningkatan harga pakan sebesar 30 persen. Penentuan pakan sebagai indikator dari perubahan dalam analisis sensitivitas adalah pakan merupakan komponen biaya terbesar yang dikeluarkan peternak.

(3) Analisis Gabungan

Analisis sensitivitas gabungan butir (1) dan (2) dilakukan untuk melihat pengaruh terhadap tingkat keuntungan dan daya saing (keunggulan kompetitif dan komparatif) perusahaan sapi perah. Perubahan yang dilakukan secara

bersamaan yakni naik atau turunnya harga output (akibat perubahan tarif impor nol, dan 15 persen) dan jika terjadi kenaikan harga pakan (harga pakan naik 30 persen).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Berdasarkan usia, para responden sebagian besar berada pada usia tua yaitu pada rentang usia 51 tahun sampai 75 tahun (50%). Sebanyak 46,67 persen responden berada di usia 26-50 dan hanya 3,33 persen yang berada pada rentang usia 0-25 tahun. Tingginya persentase peternak yang berusia lebih dari 50 tahun, pada satu sisi menunjukkan bahwa faktor usia tidak membatasi para peternak untuk melakukan aktivitasnya, namun di sisi lain menunjukkan lambatnya regenerasi peternak di daerah penelitian (Tabel 3).

Tingkat pendidikan para responden sebagian besar (56,67%) hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Pengalaman melaksanakan usaha ternak sapi perah peternak rata-rata antara 10-20 tahun (43,33 persen responden), dan 60 persen responden menjadikan ternak sapi perah sebagai usaha utama.

Peternakan di lokasi wilayah penelitian dapat dikatakan sebagai peternakan sapi perah rakyat karena 66,67 persen responden mempunyai sapi perah hanya satu sampai dengan tiga ekor, sedangkan 33,33 persen responden memiliki sapi perah lebih dari tiga

ekor. Banyaknya kepemilikan ternak sapi perah akan menentukan besarnya pendapatan peternak. Semakin banyak jumlah sapi perah yang dimiliki oleh peternak maka jumlah produksi susu segar yang dihasilkan akan semakin banyak sehingga pendapatan peternak akan semakin meningkat.

**Perkembangan Harga Susu Internasional dan Dalam Negeri**

Harga susu merupakan salah satu indikator yang menentukan daya saing peternakan sapi perah rakyat.

Perkembangan harga susu internasional (dunia) sangat menentukan harga susu dalam negeri karena 70 persen dari kebutuhan susu nasional masih dipenuhi dari impor. Peran pemerintah dalam upaya melindungi produsen (peternak rakyat) melalui penetapan tarif bea masuk juga sangat mempengaruhi harga di dalam negeri.

Berdasarkan informasi yang disajikan pada Tabel 4 tampak bahwa harga susu dunia sejak tahun 2007-2012 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2007 harga susu per kilogram yakni sebesar USD 4,62 (setara dengan Rp. 5.680,82/liter). Harga

**Tabel 3**  
**Karakteristik Responden Usahaternak Sapi Perah di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur.**

Deskripsi Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase (%)
<b>Usia (Tahun)</b>	0-25	3,33
	26-50	46,67
	51-75	50,00
<b>Tingkat Pendidikan</b>	SD	56,67
	SMP	23,33
	SMA	16,67
	Perguruan Tinggi	3,33
<b>Pengalaman (Tahun)</b>	<10	13,33
	10-20	43,33
	21-30	30,00
	>30	13,33
<b>Status Usaha Peternakan</b>	Pekerjaan Utama	60,00
	Pekerjaan Sampingan	40,00
<b>Kepemilikan Sapi (ekor)</b>	1-3	66,67
	>4	33,33

**Tabel 4.**  
**Harga Susu di Tingkat Dunia dan Dalam Negeri/Peternak\*)**

Tahun	Harga FCMP (USD/kg)	Harga FCMP Setara Susu Segar (Rp/l) (Impor)	Harga Susu Tingkat Peternak (Rp/l) (DN)	Rasio Harga (DN/Impor)
2007	4,62	5.680,82	2.000	0,35
2008	4,00	5.214,97	3.150	0,60
2009	2,83	3.773,88	2.950	0,78
2010	3,62	4.425,40	3.050	0,69
2011	4,27	4.997,70	3.100	0,62

Keterangan :

\*) Perhitungan harga FCMP setara satu liter susu segar dalam negeri, dapat dilihat pada Lampiran 1.

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Peternakan Kabupaten Malang (2007-2011) dan *International Dairy Product Prices, Understanding Dairy Markets* (2012).

pada tahun ini merupakan yang tertinggi selama lima tahun. Pada tahun 2009 harga susu mengalami penurunan yakni sebesar USD 2,83/kg (setara Rp. 3.773,88 per liter). Hal ini dimungkinkan terjadi, karena pada tahun 2008-2009 Amerika dan Eropa mengalami krisis keuangan, sehingga menurunkan jumlah permintaan susu, dengan demikian pasokan susu dunia lebih besar dari permintaan. Perbaikan ekonomi (setelah krisis) harga susu mengalami peningkatan yakni, menjadi USD 4,27/kg (setara Rp. 4.997,70 per liter). Walaupun pada tahun 2007 harga susu dunia mencapai harga tertinggi selama lima tahun, namun di tingkat peternak harga tersebut merupakan harga terendah. Berdasarkan *trend* perkembangan harga susu di tingkat peternak, tampak bahwa harga di dalam

negeri cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2007 hingga 2011, walaupun tahun 2009 sempat mengalami penurunan. Tahun 2007 harga susu di tingkat peternak sebesar Rp. 2.000 per liter, sedangkan tahun 2011 sebesar Rp. 3.100 per liter.

Pada Tabel 4 juga tampak bahwa rasio harga susu dalam negeri dengan harga susu dunia bernilai kurang dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa harga susu dalam negeri masih lebih rendah dibandingkan dengan harga susu internasional. Rasio harga susu dalam negeri dengan harga susu dunia berkisar antara 0.35 sampai 0,78, artinya harga susu dalam negeri atau di tingkat peternak hanya 35 sampai 78 persen dari harga susu internasional. Perhitungan harga susu internasional (menggunakan produk *Full Cream Milk Powder/FCMP*

26%), dihitung berdasarkan atas harga internasional ditambah dengan bea masuk sebesar lima persen dan biaya-biaya lain-lain (diasumsikan 2,5 persen), dengan demikian harga susu dalam negeri, relatif lebih murah bila dibandingkan dengan harga bahan baku susu impor setara susu segar. Hal ini juga yang membuat, IPS memiliki dorongan untuk membeli susu dalam negeri dengan jumlah yang banyak, disamping alasan susu segar sangat penting untuk memberikan aroma dan rasa, serta kadar lemak hewani pada saat pencampuran dengan bahan baku susu impor (Boediana, 2008).

Melihat pertimbangan kondisi tersebut, seharusnya peternak memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif untuk memenangkan posisi tawar dan daya saing. Namun skala kepemilikan sapi rakyat yang sangat terbatas (hanya 1-3 ekor) menyebabkan terbatas pula dalam menghasilkan susu yang berkualitas.

Disamping itu peternak sapi perah di lokasi penelitian juga tidak memiliki banyak alternatif dalam menjual susu segar yang dihasilkannya. Sebagian besar susu segar yang dihasilkan peternak dijual ke IPS melalui koperasi susu. Pembahasan berikutnya ingin menunjukkan secara ilmiah apakah dengan kondisi tersebut peternak sapi perah rakyat memiliki daya saing dalam menjalankan usahaternaknya.

#### **Analisis Daya Saing Usaha Ternak Sapi Perah Rakyat**

Untuk mengukur daya saing dalam penelitian ini melalui indikator keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Selain untuk mendeskripsikan daya saing usahaternak sapi perah rakyat, hasil penelitian ini juga berupaya untuk melihat kemampuan usaha ternak dalam bersaing dengan susu impor sebagai produk substitusi. Disamping itu penelitian ini juga dapat memberikan informasi mengenai implikasi

**Tabel 5**  
**Hasil Perhitungan Matriks PAM pada Bea Masuk Lima Persen untuk Setiap Liter Susu di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.**

Uraian	Penerimaan <i>Output</i> (Rp/liter)	Biaya <i>Input</i> (Rp/liter)		Keuntungan (Rp/liter)
		<i>Tradable</i>	Domestik	
Nilai Finansial/Privat (Harga Pasar)	3.206,00	240,80	2.283,48	681,73
Nilai Ekonomi/Sosial (Harga Bayangan)	4.870,63	208,59	2.287,27	2.374,77
Dampak Kebijakan /Distorsi Pasar	-1.664,63	32,21	-3,80	-1.693,04

kebijakan pemerintah terhadap daya saing usaha ternak di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Hasil perhitungan dari penerimaan, biaya produksi, biaya operasional dan biaya lainnya dapat dilihat pada matriks PAM yang disajikan pada Tabel 5.

#### **Analisis Keunggulan Kompetitif**

Keuntungan kompetitif menunjukkan kondisi sebenarnya yang diterima dan dibayarkan peternak dalam menjalankan usaha ternaknya. Keuntungan finansial pada usaha ternak merupakan selisih penerimaan atau harga jual susu untuk setiap satu liter susu dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi susu, yang memperhitungkan harga sebenarnya dimana telah mendapat pengaruh dari kebijakan pemerintah. Keuntungan total usahaternak menggambarkan keuntungan yang dihasilkan pada perusahaan/produksi susu dan menggambarkan nilai tambah dari komoditas tersebut. Pada Tabel 5 tampak bahwa penerimaan peternak untuk skala usahaternak rata-rata tiga (3) ekor sapi perah di Kecamatan Pujon, Malang secara finansial adalah sebesar Rp. 3.206 per liter.

Biaya total yang dikeluarkan oleh peternak untuk menghasilkan satu liter susu segar adalah Rp. 2.524,28 yang terdiri dari biaya input *tradable* sebesar Rp. 240,80 per liter susu dan biaya input *non tradable* sebesar Rp. 2.283,48 per liter susu segar yang dihasilkan. Dari perhitungan

penerimaan dan biaya yang dikeluarkan, maka nilai keuntungan finansial yang diperoleh untuk setiap liter susu yang dihasilkan adalah sebesar Rp. 681,73. Nilai ini memiliki pengertian bahwa keuntungan yang diterima peternak pada perusahaan sapi perah untuk memproduksi susu sapi segar serta dengan adanya kebijakan pemerintah (intervensi) adalah sebesar Rp. 681,73. Nilai keuntungan yang positif menunjukkan bahwa penerimaan secara finansial (yang benar-benar diterima oleh peternak) lebih besar dari total biaya (*tradable* dan *non tradable*). Jika keuntungan finansial/privat lebih besar dari nol ( $>0$ ) menunjukkan bahwa secara finansial peternak memperoleh keuntungan dari usaha ternak yang dijalankan.

Keunggulan kompetitif suatu komoditi dapat dilihat bagaimana alokasi sumber daya diarahkan untuk mencapai efisiensi finansial dalam usaha untuk memproduksi susu sapi. Hasil analisis menunjukkan nilai PCR diperoleh sebesar 0,77. Nilai PCR yang lebih kecil dari satu menunjukkan bahwa usaha ternak sapi perah memiliki keunggulan kompetitif dan juga mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan harga yang diterima peternak dengan kondisi sebenarnya. Nilai PCR sebesar 0,77 memiliki arti bahwa untuk mendapatkan nilai tambah output sebesar satu rupiah pada harga privat/aktual hanya diperlukan tambahan biaya sebesar Rp. 0,77. Hal ini juga dapat menginformasikan bahwa faktor domestik sudah efisien sehingga

layak untuk diusahakan dan dikembangkan. Namun pada kondisi ini harga yang diterima oleh peternak masih relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan harga internasional.

### **Analisis Keunggulan Komparatif**

Keuntungan sosial yang diperoleh adalah sebesar Rp. 2.374,74 per liter susu yang berarti usaha ternak yang dijalankan menguntungkan secara ekonomi walaupun tanpa adanya kebijakan pemerintah. Nilai keuntungan sosial yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan keuntungan privat di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang mengindikasikan bahwa adanya kebijakan atau intervensi pemerintah yang berupa distorsi pasar masih belum memberikan insentif yang cukup baik kepada peternak sapi perah rakyat. Nilai distorsi keuntungan yang terjadi adalah sebesar - Rp. 1.693,04 per liter susu, yang berasal dari distorsi penerimaan sebesar - Rp. 1.664,63 dengan total biaya sebesar Rp.28,41 per liter susu.

Nilai DRC yang diperoleh dari usaha ternak sapi perah ini adalah sebesar 0,49 ( $DRC < 1$ ). Nilai ini memiliki makna bahwa usahaternak yang dijalankan oleh peternak rakyat di Kecamatan Pujon, Malang mampu memproduksi susu sapi dengan biaya 49 persen dari biaya impor yang dibutuhkan. Disparitas harga impor yang tinggi dengan harga dalam negeri, menjadi penyebab susu lokal menjadi lebih murah untuk diperoleh.

Jika dibandingkan dengan keuntungan ekonomi, keuntungan privat yang diperoleh

lebih kecil. Nilai keuntungan privat yang lebih kecil dari keuntungan sosial menunjukkan bahwa usahaternak sapi perah lebih menguntungkan saat tidak adanya intervensi pemerintah baik terhadap input dan output. Nilai keuntungan privat yang lebih kecil disebabkan harga di tingkat peternak lebih rendah dari harga di pasar dunia/internasional. Harga susu di pasar internasional dihitung berdasar *c.i.f* ditambah biaya tata niaga yang menjadi lebih tinggi dengan harga di pasar finansial. Selain itu biaya input *non tradable* yang dikeluarkan oleh peternak berdasarkan analisis finansial jauh lebih tinggi sehingga keuntungan privat yang diperoleh usaha ternak sapi perah rakyat lebih rendah secara finansial dari keuntungan sosialnya. Penyebab tingginya biaya *non tradable* dikarenakan masih banyak komponen input yang bahan bakunya berasal dari impor (pakan, obatan-obatan dan vitamin). Berdasarkan nilai DRC yang relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan PCR ( $DRC < PCR$ ) menunjukkan bahwa belum optimalnya kebijakan pemerintah yang berupaya untuk meningkatkan efisiensi produsen dalam berproduksi.

Berdasarkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, pada kondisi aktual (penetapan tarif bea masuk sebesar lima persen), menunjukkan usaha ternak sapi perah rakyat memiliki daya saing. Hal ini mengindikasikan lebih murah untuk memproduksi susu di dalam negeri, daripada

harus mengimpor. Namun demikian permasalahan yang dihadapi, walaupun usaha ternak memiliki daya saing, sejauh ini peternak kita baru mampu memenuhi 25-30 persen kebutuhan susu nasional. Beberapa masalah yang dihadapi ketika usahaternak memiliki daya saing, namun tidak mampu meningkatkan produksinya, dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut : (1) Skala kepemilikan ternak yang sangat rendah, (2) produktivitas dan kualitas susu yang dihasilkan per hari sangat rendah, (3) insentif yang diterima peternak sangat minim, sehingga motivasi untuk mengembangkan ternaknya sebagai bisnis atau usaha menjadi tidak ada, (4) ketidakadilan sistem transaksi yang terjadi baik untuk mendapatkan bibit, pakan, dan penjualan susu, dan terbatasnya teknologi yang dimiliki peternak untuk mengolah langsung susu yang dihasilkan secara kelompok (koperasi).

Perlu upaya komprehensif untuk mampu mempertahankan dan memanfaatkan daya saing yang ada tersebut. Permasalahan yang disampaikan sebelumnya hendaknya menjadi pijakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan peternaknya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, disebutkan bahwa pemerintah belum optimal dalam pengembangan usahaternak, cenderung peran pemerintah malah mendistorsi pasar dan merugikan peternak. Walaupun demikian bukan berarti pemerintah tidak boleh berperan sama sekali, sebaliknya perlu

disusun formulasi kebijakan yang tepat untuk dapat mengembangkan usaha ternak sapi perah tanpa harus mendistorsi pasar. Beberapa kebijakan tersebut adalah (1) memperkuat penelitian dan pengembangan peternakan agar mampu menghasilkan bibit unggul yang mampu meningkatkan produksi dan kualitas sapi, (2) pemerintah perlu melakukan pendampingan secara intensif dengan memanfaatkan koperasi dan IPS sebagai mitra langsung untuk melakukan pembinaan kepada peternak untuk menghasilkan susu yang berkualitas, (3) pemerintah merangsang pasar dalam negeri untuk memanfaatkan susu segar sebagai bentuk membuka pasar baru, selain ke IPS dengan produk susu olahan, dan (4) berupaya untuk menciptakan harga susu sapi yang adil bagi peternak.

#### **Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah**

Hasil analisis pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Transfer output adalah negatif Rp. 1.664,63 per liter susu. Artinya harga output di pasar domestik pada perusahaan sapi perah lebih rendah bila dibandingkan dengan harga pasar internasional atau terdapat transfer output dari produsen ke konsumen sebesar Rp. 1.664,63 per liter susu. Dengan demikian, konsumen (IPS) mendapat harga yang lebih rendah bila dibandingkan dengan harga susu impor, dengan kata lain produsen memberikan subsidi kepada para konsumen apabila pasar tidak terdistorsi atau tanpa

kebijakan pemerintah. Perlunya perlindungan kepada produsen susu segar, dalam hal ini adalah peternak rakyat, yakni dengan penetapan tarif bea masuk yang adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi IPS dan peternak. Walaupun WTO, sudah menetapkan bahwa susu merupakan produk dengan ketentuan non tarif (nol persen). Pemerintah harus dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat menciptakan kondisi yang adil.

Nilai koefisien proteksi output nasional (NPCO) adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara penerimaan yang dihitung berdasarkan harga bayangan. Nilai NPCO merupakan indikasi dari transfer input. Nilai NPCO yang diperoleh dari penelitian ini adalah 0,66 atau kurang dari satu ( $NPCO < 1$ ) menunjukkan bahwa tidak terdapat proteksi harga output dalam hal ini harga susu segar, sehingga

menyebabkan harga yang diterima oleh peternak jauh lebih rendah. Pemerintah saat ini menetapkan tarif bea masuk susu impor sebesar lima persen, ini membuktikan bahwa tarif tersebut belum efisien. Dengan demikian seluruh konsumen dan produsen dalam negeri menerima harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya diterima peternak sapi perah rakyat. Dalam kasus ini terdapat transfer pendapatan dari peternak sapi perah rakyat kepada konsumen, dalam hal ini adalah IPS yang merupakan perusahaan besar. Dalam hal ini penetapan tarif bea masuk sebesar lima persen, masih bersifat disinsentif pada usaha ternak sapi perah rakyat.

Pada Tabel 6 dideskripsikan bagaimana kebijakan pemerintah pada input-input dan gabungan antara input-output. Dalam kebijakan secara keseluruhan baik terhadap input maupun output dapat dilihat dari

**Tabel 6**  
**Indikator Daya saing dan Implikasi Kebijakan Pemerintah**

<b>Indikator Daya saing</b>	<b>Nilai</b>
Keuntungan Privat (Rp/l)	681,73
Keuntungan Sosial (Rp/l)	2.374,77
Transfer Output (Rp/l)	-1.664,63
Transfer Input utk input <i>tradable</i> (Rp/l)	32,21
Transfer Faktor utk <i>non Tradable</i> (Rp/l)	-3,80
Transfer Bersih (Rp/l)	-1.693,04
Rasio biaya privat (PCR)	0,77
Rasio biaya sumberdaya domestik (DRC)	0,49
NPCO	0,66
NPCL	1,15
EPC	0,64
PC	0,29
SRP	-0,35

koefisien efektif, transfer bersih (NT), koefisien keuntungan (PC), dan rasio subsidi bagi produsen (SRP).

Nilai koefisien efektif (EPC) yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebesar 0,64. Nilai  $EPC < 1$  menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap harga output maupun subsidi terhadap input belum dapat melindungi peternak sapi perah rakyat dan ternyata menghambat peternak untuk memproduksi. Nilai 0,64 berarti kebijakan pemerintah terhadap input-output menyebabkan peternak memperoleh tambahan keuntungan sebesar 64 persen dari nilai harga bayangannya. Hal ini dapat kita lihat, bagaimana peternak sulit mendapatkan pakan baik dari segi jumlah maupun harga, masih mahalnya harga-harga input produksi (obat-obatan, vitamin dan saprotan lain), serta rendahnya harga jual susu yang kadang tidak jelas penentuan kadar kualitas berdasarkan apa. Diharapkan kebijakan pemerintah mampu menunjukkan nilai  $EPC > 1$ , yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mampu memberikan insentif bagi peternak rakyat.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa koefisien keuntungan (PC) yaitu rasio antara keuntungan bersih aktual dengan keuntungan bersih ekonomi. Nilai PC menunjukkan pengaruh gabungan pada output dan input *tradable*. Rasio ini digunakan untuk mengukur dampak kebijakan yang menyebabkan perbedaan tingkat keuntungan finansial dan keuntungan

ekonomi. Nilai PC yang diperoleh adalah sebesar 0,29, yang ( $PC < 1$ ) mengindikasikan bahwa kerugian peternak bila ada pengaruh dan intervensi pemerintah sebesar 29 persen dari kerugian yang diterima tanpa adanya kebijakan pemerintah. Sedangkan nilai transfer bersih yang diperoleh adalah sebesar – Rp.1.693,04 menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pemerintah selama ini terhadap input-output belum memberikan insentif ekonomi untuk meningkatkan produksi susu. Keuntungan yang diperoleh peternak ketika terdapat kebijakan pemerintah (seperti saat ini) lebih rendah Rp. 1.693,04 bila dibandingkan kerugian apabila tidak ada campur tangan pemerintah.

Rasio subsidi bagi produsen (SRP) merupakan rasio transfer bersih dengan penerimaan berdasarkan harga bayangan. Nilai SRP yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebesar -0,35. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan saat ini menyebabkan peternak sapi perah rakyat harus mengeluarkan biaya produksi lebih besar, yakni 35 persen dari *opportunity cost* untuk memproduksi. Jadi ketika pemerintah saat ini menetapkan tarif impor sebesar lima persen, terbukti belum optimal melindungi peternak rakyat, bahkan cenderung merugikan peternak sapi perah rakyat tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan kemampuan usahatnaka kita memiliki daya saing yang baik.

Nilai transfer input (TI) sebesar 32,21 menunjukkan bahwa terdapat transfer

peternak sapi rakyat kepada input *tradable*. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi seharusnya, dimana peternak yang harusnya mendapat transfer dari penggunaan input, bukan memberikan subsidi kepada input yang dibeli. Untuk nilai transfer faktor sebesar – Rp. 3, 80 yang berarti bahwa saat ini kebijakan pemerintah belum mampu melindungi input domestik, hal ini dilihat sudah tidak diberikan lagi subsidi pakan kepada peternak (sejak tahun 2000 sudah dihapus).

Indikator terakhir yang akan dibahas dari hasil analisis ini adalah nilai NPCL merupakan rasio yang mengukur tingkat input transfer yang menunjukkan bahwa karena adanya subsidi, terutama pada input. Nilai NPCL sebesar 1,15 ( $NPCL > 1$ ) memberikan arti bahwa dicabutnya subsidi pakan ternak sejak tahun 2000, mengindikasikan bahwa pemerintah menaikkan harga input *tradable* di pasar domestik diatas harga efisiensinya. Hal ini berimplikasi bahwa usahaternak rakyat dirugikan, karena peternak harus membayar harga input lebih besar 15 persen dari harga internasionalnya.

#### **Analisis Sentivitas Daya saing Usaha ternak Sapi Perah Rakyat**

Analisis sentivitas dilakukan untuk melihat kondisi daya saing sapi perah rakyat dengan perubahan variabel tertentu. Data *cross section* yang diperoleh pada saat pengumpulan data bersifat statis, dan perlu

dilakukan simulai akibat kemungkinan perubahan yang pernah atau akan terjadi. Berdasarkan hal tersebut maka di luar kondisi normal (perhitungan sebelumnya dengan tarif bea masuk sebesar lima persen), maka dilakukan lima skenario dalam analisis sentivitas tersebut.

Pada Tabel 7 tampak bahwa dari lima skenario yang disimulasikan dalam penelitian ini, skenario dengan penetapan tarif bea masuk sebesar 15 persen memberikan kondisi yang terbaik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai keuntungan *privat* (Rp. 996,73 per liter susu) dan keuntungan sosial (Rp. 2.838,64/liter susu) sehingga dari kondisi aktual dan ekonomi pada skenario ini peternak memiliki keuntungan lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi pada skenario lainnya. Daya saing yang lebih baik, bila dibandingkan terhadap skenario lainnya adalah keunggulan komparatif ( $PRC=0,70$ ) dan keunggulan kompetitif ( $DRC= 0,45$ ). Kondisi ini menunjukkan jika tarif bea masuk ditetapkan menjadi 15 persen, maka efisiensi peternak dalam menjalankan usaha ternaknya lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi lain, termasuk pada kondisi saat ini dengan tarif bea masuk lima persen. Sehingga usulan GKSI untuk berupaya meningkatkan tarif bea masuk sebesar 15 persen sangat baik untuk diterapkan oleh pemerintah, tentunya dengan tidak melanggar kesepakatan dalam WTO.

Ketika pemerintah menurunkan tarif bea masuk menjadi nol persen, maka

peternak akan menerima dampak kerugian selain penurunan keuntungan baik secara ekonomi dan privat. Usahaternak relatif tidak menjadi lebih efisien ketika dibandingkan dengan kondisi aktual (tarif bea masuk lima persen). Kondisi yang sangat merugikan petani adalah ketika, tarif bea masuk nol persen yang ditetapkan oleh pemerintah bersamaan dengan kenaikan harga pakan sebesar 30 persen. Dengan demikian keuntungan yang diterima peternak menjadi lebih rendah dari seluruh skenario yang ada (keuntungan privat sebesar Rp. 260,59,-, keuntungan sosialnya sebesar Rp. 1.909,-, nilai PRC sebesar 0,90 dan DRC sebesar 0,56) menunjukkan terjadi penurunan dayaasaing peternakan sapi perah rakyat.

Daya saing yang dimiliki oleh peternak secara umum dinilai belum optimal dijalankan. Daya saing tersebut masih dapat ditingkatkan lebih baik lagi untuk memberikan kesejahteraan bagi peternak. Masih terbatasnya dan belum optimalnya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah memberikan indikasi bahwa daya saing peternakan sapi perah masih belum bisa memberikan nilai tambah yang memberikan keuntungan bagi produsen (peternak) secara baik. Melihat kondisi tersebut hendaknya pemerintah, mencari format kebijakan yang sesuai tanpa mendistorsi pasar serta berupaya untuk menciptakan dan membuka pasar susu segar dalam negeri dengan basis produksi adalah koperasi itu sendiri, sebagai organisasi peternak.

**Tabel 7**  
**Analisis Sensitivitas Daya saing Usahaternak Sapi Perah Rakyat di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang**

Skenario	Indikator Daya saing			
	Profitabilitas (Rp/l)		PCR	DRC
	Privat/ Finansial	Sosial/ Ekonomi		
Tarif Impor nol persen	524,23	2.142,83	0,81	0,52
<b>Tarif Impor 15 persen*)</b>	<b>996,73</b>	<b>2.838,64</b>	<b>0,70</b>	<b>0,45</b>
Harga Pakan Naik 30 persen	418,09	2.141,73	0,86	0,53
<b>Tarif Impor nol persen dan harga pakan naik 30 persen**)</b>	<b>260,59</b>	<b>1.909,79</b>	<b>0,90</b>	<b>0,56</b>
Tarif Impor 15 persen dan harga pakan naik 30 persen	733,09	2.605,60	0,77	0,49

Keterangan :

\*) Kondisi daya saing tertinggi

\*\*\*) Kondisi daya saing terendah

## **SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

1. Usaha ternak sapi perah rakyat di Kecamatan Pujon, Malang Jawa Timur memiliki keunggulan daya saing yang ditunjukkan dengan keunggulan kompetitif ataupun keunggulan komparatif.
2. Daya saing yang dimiliki oleh peternak sapi perah rakyat belum mampu meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan susu masyarakat. Secara umum hal ini terjadi karena rendahnya harga jual susu yang diterima peternak sapi perah rakyat dan terbatasnya skala usaha.
3. Implikasi kebijakan yang telah dan sedang diterapkan oleh pemerintah dinilai belum optimal memberikan insentif dan peningkatan daya saing usahaternak sapi perah di Kecamatan Pujon, Malang Jawa Timur.
4. Penetapan tarif bea masuk sebesar (impor) 15 persen dinilai mampu meningkatkan daya saing usaha ternak sapi perah rakyat di Kecamatan Pujon, Malang.

### **Implikasi Kebijakan**

1. Perlu kebijakan dan upaya yang komprehensif untuk mempertahankan dan memanfaatkan daya saing yang sudah ada. Beberapa kebijakan tersebut

adalah : *Pertama*, memperkuat lembaga penelitian dan pengembangan peternakan termasuk perguruan tinggi. Penguatan kedua institusi ini akan dapat menghasilkan bibit unggul yang mampu meningkatkan produksi dan kualitas sapi; *Kedua*, pemerintah perlu melakukan pendampingan intensif dengan memanfaatkan koperasi dan IPS sebagai mitra langsung untuk pembinaan kepada peternak sehingga dapat dihasilkan susu berkualitas; *Ketiga*, pemerintah merangsang pasar dalam negeri untuk memanfaatkan susu segar sebagai bentuk membuka pasar baru, selain ke IPS dengan produk susu olahan; *Keempat*, kualitas dan peran koperasi sebagai wadah organisasi ekonomi bagi peternak sapi perah rakyat perlu terus ditingkatkan terutama penguatan posisi tawar peternak dalam penetapan harga ke IPS sehingga harga jual susu yang lebih baik dan adil bagi peternak dapat terwujud.

2. Dipandang perlu dilakukan studi lanjutan yang lebih komprehensif untuk melihat daya saing usaha pada skala kepemilikan yang berbeda, terutama pada skala industri dan koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Babiker, et.al. (2011). *Sudanese Live Sheep and Mutton Export Competitiveness*. Journal of The Saudi Society of Agricultural Sciences 10 : 25 – 32.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2011). *Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Subsektor Tahun 2004 – 2009*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Boediyana, T. (2008). *Menyongsong Agribisnis Persusuan Yang Prospektif di Tanah Air*. Majalah Trobos No.108.Ed. September 2008 (VIII), Jakarta.
- Daryanto, Arif. (2009). *Posisi Daya Saing Pertanian Indonesia Dan Upaya Peningkatannya*. Di dalam Seminar Nasional : *Peningkatan Daya Saing Agribisnis Berorientasi Kesejahteraan Petani*. Bogor, 14 Oktober 2009. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
- Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2010). *Blue Print Persusuan Nasional*. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2012). Struktur Populasi Ternak Sapi Perah Hasil PSPK2011 Per Per Provinsi (2011). Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Jakarta
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2012). *Action Plan Budidaya Peternakan Sapi Perah Rakyat Menuju Swasembada Susu Tahun 2020*. Disampaikan pada Workshop Pengembangan Sapi Perah Indonesia, Hotel Rich Yogyakarta, 22-23 Juni 2012.
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2011). *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2011*. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Jakarta.
- Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. (2011). *Statistik Produksi Ternak Jawa Timur*. [http://disnak.jatimprov.go.id/web/statistik\\_produk\\_detail.php](http://disnak.jatimprov.go.id/web/statistik_produk_detail.php) [diakses 14 Mei 2012].
- Ditjennak. (2010). *Populasi dan Perkembangan Usaha Peternakan Indonesia*. Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Feryanto. (2010). *Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Susu Sapi Lokal di Jawa Barat*. [Tesis]. Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.

- Harmini *et.al.* (2012). *Analisis Kelayakan Usahaternak Sapi Perah Rakyat dan Pemasaran Susu di Jawa Timur*. Tidak Di publikasikan. Laporan Penelitian Unggulan Departemen Agribisnis FEM IPB, Bogor.
- International Dairy Product Prices. (2012). *Full Cream Milk Powder Prices*. [http://future.aae.wisc.edu/data/weekly\\_values/by\\_area/1705](http://future.aae.wisc.edu/data/weekly_values/by_area/1705). Diakses 5 November 2012.
- Kadariah, Lien K., dan Grey C. (1978). *Evaluasi Proyek Analisis EKonomi*. Edisi 1. Fakultas Ekonomi. UI Press, Jakarta.
- Kuraisin, V. (2006). *Analisis Daya Saing dan Dampak Perubahan Kebijakan Pemerintah terhadap Komoditi Susu Sapi (Kasus di Desa Tajurhalang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor)*. [Skripsi]. Fakultas Pertanian, Insitut Pertanian Bogor, Bogor.
- Mongke, E. A dan S. R. Pearson. (1998). *The Policy Analysis Matriks for Agriculture Development*. Cornell University Press, Itacha and London.
- Pearson, *et.al.* (2005). *Aplikasi Policy Analysis Matrix Pada Pertanian Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Priyanti, A., W. Rindayati dan G. A. J. Rumagit. (2004). *Dampak Kebijakan Industri Susu Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Penelitian Peternakan WARTAZOA, 3 (3) : 257-268

### Lampiran 1. Perhitungan Nilai Susu Impor Setara Susu Segar

Minggu Ke... September 2012	Harga FCMP (US\$/Kg )	Harga FCMP (Rp/Kg )	Harga FCMP+Foreign And Insurance	Harga Susu Dalam Negeri (Rp/l)
1	2	3	4=3*5%	5=4/8
Minggu I	3,55	34.273,6	35.987,2	4.498,4
Minggu II	3,84	37.049,2	38.901,7	4.862,7
Minggu III	3,86	37.290,6	39.155,1	4.894,4
<b>SER</b>	<b>9654.52</b>		<b>Harga Rata-Rata</b>	<b>4.751,8</b>

**Lampiran 2. Alokasi/Proporsi Biaya Input dan Output Dalam Komponen Domestik Dan Asing**

No	Uraian	Persentase (%)		
		Domestik	Asing	Pajak
A	Penerimaan			
1	Susu segar	100	0	0
2	Kotoran Sapi Basah	100	0	0
B	Biaya Produksi			
1	Sewa Lahan	100	0	0
2	Pakan Ternak	75	15	10
3	Obat-obatan	78,45	15,625	5,93
4	Biaya Air	100	0	0
5	Tenaga Kerja	100	0	0
6	Penyusutan Peralatan	100	0	0
7	Penyusutan kandang	100	0	0
8	Bunga Modal	100	0	
C	Biaya Tata Niaga			
1	Pengangkutan Susu	85	10	5
2	Pengangkutan Pakan	85	10	5
3	Pemasaran	100	0	0

Sumber : Kuraisin. 2006 dan Feryanto, 2010

**Lampiran 3. Perhitungan SCF dan SER (Sept 2012)**

Uraian	Nilai Dalam	
	US\$ (Juta)	Nilai Rp (juta)
Total Ekspor (Xt)	15.902,5	151.598.532
Total Impor (Mt)	15.349,6	146.327.736
Penerimaan Pajak Ekspor (TXt)		19.050.000
Penerimaan Pajak Impor (TMt)		15.300.000
Nilai Tukar Rp/US\$ (OER)	9.533	
Xt+Mt		297.926.269,3
Xt-TXt		132.548.532,5
Mt+TMt		161.627.736,8
SCFt	<b>1,01</b>	
SER	<b>9.654,52</b>	

**Lampiran 4. Harga Susu Rata-Rata Internasional yang Digunakan Pada Perhitungan PAM (Rp/l)**

<b>Harga Rata-rata</b>	<b>2.5% Tataniaga</b>	<b>Harga Akhir di tingkat Peternak (Rp/liter)</b>
4.751,83	118,80	4.870,63

**Lampiran 5. Hasil PAM dan Indikator Daya Saing di Kecamatan Pujon, Malang yang Dihitung untuk Setiap Liter.**

<b>Uraian</b>	<b>Penerimaan Output (Rp/liter)</b>	<b>Biaya Input (Rp/liter)</b>		<b>Keuntungan (Rp/liter)</b>
		<i>Tradable</i>	<i>Domestik</i>	
Nilai Finansial	3.206,00	240,80	2.283,48	681,73
Nilai Ekonomi	4.870,63	208,59	2.287,27	2.374,77
Dampak Kebijakan dan Distorsi Pasar	-1.664,63	32,21	-3,80	-1.693,04
<b>Indikator Daya saing</b>	<b>Nilai</b>			
Keuntungan Privat (Rp/l)	681,73			
Keuntungan Sosial (Rp/l)	2.374,77			
Transfer Output (Rp/l)	-1.664,63			
Transfer Input utk input <i>tradable</i> (Rp/l)	32,21			
Transfer Faktor utk Non <i>tradeble</i> (Rp/l)	-3,80			
Transfer Bersih (Rp/l)	-1.693,04			
Rasio biaya privat (PCR)	0,77			
Rasio biaya sumberdaya domestik (DRC)	0,49			
NPCO	0,66			
NPCL	1,15			
EPC	0,64			
PC	0,29			
SRP	-0,35			